

**PEMERINTAHAN DAERAH SELEBES SELATAN PADA MASA NEGARA  
INDONESIA TIMUR 1946-1950**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Sarjana pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

**DISUSUN OLEH :  
USWATUN HASANA  
F061191007**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 486/UN4.9/KEP/2023

Tanggal : 24 Maret 2023

Nama Mahasiswa : Uswatun Hasana

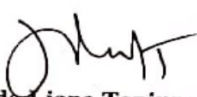
NIM : F061191007


Menyetujui skripsi ini, untuk diteruskan kepada Tim Penguji di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Makassar, 28 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ida Liana Tanjung M.Hum.  
NIP. 19781120228122002

  
Andi Lili Evita S.S., M.Hum.  
NIP. 199001112019032017

Disetujui untuk diteruskan  
kepada Panitia Ujian Skripsi  
Dekan  
u.b. Ketua Departemen Ilmu Sejarah



Dr. Ilham, S.S., M.Hum  
NIP. 19760827 200801 1 011

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PEMERINTAHAN DAERAH SELEBES SELATAN PADA MASA NEGARA  
INDONESIA TIMUR 1946-1950**

Disusun dan diajukan oleh :

**USWATUN HASANA**


**F061191007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 28 Juni 2024 dan dinyatakan lulus serta telah memenuhi sejumlah persyaratan.


**Menyetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Ida Liana Tanjung, M. Hum**

**NIP. 197811202008122002**

  
**Andi Lili Evita, S.S., M.Hum**

**NIP. 199001112019032017**


**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

  
**Prof. Dr. Akin Dull, M.A**

**NIP. 196407161991031010**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah  
Universitas Hasanuddin**

  
**Dr. Ilham, S.S., M.Hum**

**NIP. 197608272008011011**

**HALAMAN PENERIMAAN**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDI**







Pada hari Jumat, 28 Juni 2024, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi berjudul

**PEMERINTAHAN DAERAH SELEBES SELATAN PADA MASA  
NEGARA INDONESIA TIMUR 1946-1950**

yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Juni 2024

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

- |                                  |               |   |   |
|----------------------------------|---------------|---|---|
| 1. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum  | Ketua         | : |  |
| 2. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum  | Sekretaris    | : |  |
| 3. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum | Penguji I     | : |  |
| 4. Nasihin, M.A                  | Penguji II    | : |  |
| 5. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum  | Pembimbing I  | : |  |
| 6. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum  | Pembimbing II | : |  |

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,*

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan kasih sayangNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemerintahan daerah Selebes Selatan Pada Masa Negara Indonesia Timur 1946-1950”. Penulisan skripsi ini adalah hasil dari penelitian penulis yang merupakan salah satu upaya dalam memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan material maupun bantuan moral. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan kali ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Terima kasih kepada Bapak Imran dan Ibu Suhaeni selaku orang tua penulis yang selalu menemani setiap langkah penulis. Dengan dukungan yang terus mengalir dari kedua orang tua, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan hati yang bahagia dan penuh syukur. Segala perjuangan yang telah dilakukan penulis selama masa kuliah, terdapat sosok ayah dan ibu yang perjuangannya pun tak kalah hebatnya. Maka dari itu, pencapaian ini merupakan persembahan istimewa yang diberikan penulis kepada mereka.

2. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa Ms.c selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang senantiasa berusaha menyediakan pelayanan yang terbaik sesuai kebutuhan mahasiswa di Universitas Hasanuddin.
3. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Akin Duli M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
4. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ilham Daeng Makkelo S.S., M.Hum selaku Kepala Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
5. Terima kasih kepada Dr. Ida Liana Tanjung selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik.
6. Terima kasih kepada A. Lili Evita S.S., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah turut membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Terima kasih kepada Drs. Dias Pradadimara M.A selaku pembimbing akademik penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis bukan hanya dalam penulisan skripsi ini, melainkan meliputi seluruh hal yang menyangkut akademik penulis, mulai dari mata kuliah, penyusunan proposal, pencarian literatur pustaka dan arsip, serta dorongan semangat selama penyusunan skripsi.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Departemen Ilmu Sejarah yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu karena telah membagikan ilmu dan nasihat kepada penulis di selang waktu saat penulisan skripsi. Tak luput pula terima

kasih diucapkan penulis kepada staf administrasi Departemen Ilmu Sejarah yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas kuliah yang dibutuhkan selama penulis berkuliah di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

9. Terima kasih kepada kedua teman kesayangan (Dea Delin Sambira dan Sri Firda Ayu) yang telah menemani penulis dalam waktu-waktu senang maupun sedih, terima kasih untuk setiap dukungan, doa, dan semua suka cita yang penulis lalui bersama selama berkuliah di Departemen Ilmu Sejarah. Dukungan mereka yang begitu besar dalam menemani penulis dapat dibuktikan dengan lahirnya gelar “tiga serangkai” dilingkup Departemen Ilmu Sejarah.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang juga telah menyumbangkan bantuan kepada penulis.
11. Terakhir, penulis ini berterima kasih kepada diri sendiri yang tidak pernah berputus asa dan selalu mau berusaha setiap waktu. Terima kasih karena telah memberikan waktu tidur dan istirahatnya untuk digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini ataupun pribadi penulis sendiri. Tanpa orang-orang hebat yang selalu memberikan bantuan kepada penulis, penulis tak akan mampu menyusun

skripsi ini. Semoga setiap bantuan yang diberikan, senantiasa bernilai ibadah di sisi

Tuhan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 2024

Penulis



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>Gambar 1 :</b> Pidato pembukaan oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H. J. Van Mook | 23 |
| <b>Gambar 2 :</b> Suasana Konferensi Malino, H. J. Van Mook melakukan pidatonya.    | 25 |
| <b>Gambar 3 :</b> Suasana persidangan Konferensi Denpasar.                          | 27 |
| <b>Gambar 4 :</b> Peta wilayah Negara Indonesia Timur dari majalah Pandji Negara    | 48 |
| <b>Gambar 5 :</b> Ide Anak Agung Gde Agung.   | 49 |
| <b>Gambar 6 :</b> Ide Anak Agung Gde Agung bersama anggota kabinetnya yang kedua    | 50 |
| <b>Gambar 7 :</b> Sonda Daeng Mattajang, salah satu wakil Dewan Selebes Selatan.    | 64 |
| <b>Gambar 8 :</b> Foto para anggota hadat Tinggi                                    | 71 |
| <b>Gambar 9 :</b> Andi Pabbenteng dengan keluarganya tahun 1947.                    | 72 |
| <b>Gambar 10 :</b> Andi Idjo Karaeng Malolang.                                      | 73 |
| <b>Gambar 11 :</b> Lanto Daeng Pasewang.  | 74 |
| <b>Tabel 1 :</b> Daftar Nama Anggota Badan Perwakilan Sementara                     | 33 |

## DAFTAR ISTILAH

|                      |   |
|----------------------|---|
| <i>Onderafdeling</i> | Wilayah administratif yang diperintah oleh seorang kontrolir.   |
| <i>Afdeling</i>      | Wilayah administratif pada yang setingkat kabupaten.  |
| <i>Groot Oost</i>    | Wilayah Timur Besar yang terdiri dari Sulawesi, Bali, Papua Barat, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan dan Sunda Kecil. |
| <i>Swapraja</i>      | Wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri.   |
| <i>Gewest</i>        | Pembagian administrasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda.   |
| <i>Zelfbestuur</i>   | Pemerintahan sendiri.   |
| <i>Gemeenebest</i>   | Negara Persemakmuran.   |
| <i>Amandemen</i>     | Perubahan dengan menambahkan, menghilangkan atau mengganti bagian tertentu.   |
| <i>Burgemeester</i>  | Walikota.   |
| <i>KNIL</i>          | Tentara kerajaan Hindia Belanda.  |
| <i>Residen</i>       | Seseorang yang memiliki residensi di suatu tempat.  |

## DAFTAR SINGKATAN

|        |   |
|--------|---|
| NIT    | Negara Indonesia Timur.                         |
| NICA   | <i>Netherlands Indies Civil Administration.</i> |
| PKRS   | Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi.              |
| PBI    | Perkumpulan Buruh Indonesia.                    |
| PKI    | Partai Kemerdekaan Indonesia.                   |
| PNI    | Partai Nasional Indonesia.                      |
| BPS    | Badan Perwakilan Sementara.                     |
| BFO    | <i>Bijeenkomst Voor Federaal Overleg.</i>       |
| RIS    | Republik Indonesia Serikat.                     |
| KNIL   | <i>Koninklijke Nederlandsch Indische Leger.</i> |
| LAPRIS | Laskar Pemberontak Republik Indonesia.          |

## ABSTRAK

**Uswatun Hasana (F061191007) dengan judul “Pemerintahan Daerah Selebes Selatan Pada Masa Negara Indonesia Timur 1946-1950”, dibimbing oleh Dr. Ida Liana Tanjung M.Hum., dan Andi Lili Evita S.S., M.Hum.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keterlambatan yang terjadi dalam proses penataan pemerintahan daerah Selebes Selatan sejak berdirinya Negara Indonesia Timur tahun 1946. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses pembentukan dan penataan pemerintah daerah Selebes Selatan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa arsip, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode sejarah tersebut, didapatkan bahwa proses pembentukan pemerintahan daerah Selebes Selatan dan perangkat NIT membutuhkan waktu selama tiga tahun sejak pembentukannya. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya perpecahan golongan pada badan pemerintahan, pemberontakan, bahkan budaya lokal di Sulawesi yang menyebabkan terhambatnya proses penyerahan tugas dan wewenang. Sedangkan faktor eksternal yaitu dikeluarkannya putusan Presiden Soekarno pada tahun 1950 untuk mengembalikan bentuk Republik sehingga NIT bersama dengan perangkat pemerintahannya harus dihapuskan. Meskipun demikian, Pemerintahan daerah di wilayah Selebes Selatan dalam beberapa aspek dinilai efektif karena melibatkan elit-elit lokal dalam pemerintahan Negara Indonesia Timur.

**Kata Kunci :** *Negara Indonesia Timur, Daerah Selebes Selatan, Tata Pemerintahan.*

## ABSTRACT

**Uswatun Hasana (F061191007) entitled “The Local Government of South Selebes During The Periode of the East Indonesia State 1946-1950”, suprivised by Dr. Ida Liana Tanjung M.Hum., dan Andi Lili Evita S.S., M.Hum.**

This research is prompted by the delays observed in the establishment of local government in South Sulawesi since the inception of the East Indonesia State in 1946. The research problem focuses on identifying the inhibiting factors in the process of forming and organizing the local government in South Sulawesi. The study adopts a historical method comprising four stages: source searching, source criticism, interpretation, and historiography. Primary sources utilized include archives, while secondary sources consist of books, journals, and other scholarly works. Based on the historical research findings, it was revealed that the formation of the local government in South Sulawesi and the institutions of the East Indonesia State required three years since their establishment. This prolonged period was influenced by both internal and external factors. Internal factors included existence of teh factional divisions in government bodies, local rebellions, and cultural dynamics in Sulawesi that impeded the transfer of responsibilities and authorities. External factors included President Soekarno's decision in 1950 to revert to a unitary Republic form, leading to the dissolution of the East Indonesia State and its governmental structures. Despite these challenges, the local government in the South Sulawesi region was deemed effective in various aspects due to the involvement of local elites in the administration of the East Indonesia State.

**Keywords:** *East Indonesian State, South Sulawesi Region, Governance Structure.*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN                              |      |
| HALAMAN PENGESAHAN                               |      |
| HALAMAN PENERIMAAN                               |      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI                      |      |
| KATA PENGANTAR.....                              | i    |
| DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....                     | v    |
| DAFTAR ISTILAH .....                             | vi   |
| DAFTAR SINGKATAN.....                            | vii  |
| ABSTRAK .....                                    | viii |
| ABSTRACT .....                                   | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                  | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                           | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                        | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                        | 7    |
| 1.3. Batasan Masalah .....                       | 7    |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....                     | 8    |
| 1.5. Manfaat Penelitian .....                    | 8    |
| 1.6. Tinjauan Pustaka .....                      | 9    |
| 1.6.1 Penelitian Yang Relevan.....               | 9    |
| 1.6.2 Landasan Konseptual .....                  | 10   |
| 1.7. Metode Penelitian.....                      | 12   |
| 1.8. Sistematika Penulisan .....                 | 17   |
| BAB II GAMBARAN UMUM NEGARA INDONESIA TIMUR..... | 18   |
| 2.1 Pembentukan Negara Indonesia Timur.....      | 18   |
| 2.1.1. Konferensi Malino.....                    | 22   |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.1.2. Konferensi Denpasar .....                       | 26        |
| 2.2. Pemerintahan Negara Indonesia Timur .....         | 29        |
| 2.2 Bubarnya Negara Indonesia Timur .....              | 46        |
| <b>BAB III PEMBENTUKAN DAERAH SELEBES SELATAN.....</b> | <b>52</b> |
| 3.1 Pembentukan Daerah Selebes Selatan .....           | 52        |
| 3.2 Pemerintahan daerah Selebes Selatan .....          | 59        |
| <b>BAB IV PEMBENTUKAN HADAT TINGGI.....</b>            | <b>66</b> |
| 4.1 Pembentukan Hadat Tinggi.....                      | 66        |
| 4.2 Peran dan Fungsi Hadat Tinggi .....                | 77        |
| <b>BAB V KESIMPULAN.....</b>                           | <b>81</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                            | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                         | <b>86</b> |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>                            | <b>93</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tahun 1946 ketika Negara Indonesia Timur didirikan dalam Konferensi Denpasar, terbentuk daerah-daerah bagian salah satunya adalah Selebes Selatan. Peristiwa ini merupakan langkah pertama bagi wilayah di Indonesia Timur untuk mencari bentuk pemerintahan. Negara Indonesia Timur didesain dengan model pemerintahan federal. NIT merupakan salah satu negara yang nantinya menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dengan model pemerintahan ini, NIT diberikan otonomi untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Konferensi Denpasar, wilayah NIT meliputi 13 daerah otonom salah satunya adalah wilayah Selebes Selatan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti dinamika penataan pemerintahan di wilayah Selebes Selatan.

Pendirian Negara Indonesia Timur melalui beberapa konferensi yang dihadiri oleh perwakilan tiap daerah dan juga beberapa pihak Belanda. Konferensi-konferensi utama yang diadakan adalah Konferensi Malino dan Konferensi Denpasar. Konferensi Malino yang dipimpin oleh Dr. H.J. van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal saat itu dihadiri oleh 15 daerah seperti daerah Bali, Lombok, Riau, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Borneo Barat, Borneo Timur, Maluku Utara, Minahasa, Sangir Talaud, Gorontalo, Sulawesi Tengah, New Guinea (Irian), Flores, Timor, Sumba, Sumbawa, Borneo Selatan, dan Maluku selatan dengan 39 wakilnya serta ditambah dengan beberapa penasihat-penasihat Pemerintah Belanda yang berjumlah empat



orang. Konferensi ini diadakan di Kota Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 15-25 Juli 1946. Konferensi ini diadakan dengan tujuan untuk membahas perencanaan pembentukan negara-negara bagian di Indonesia yang berbentuk federasi. Selain itu pada konferensi ini dibahas juga perencanaan pembentukan Negara Indonesia Timur. Para perwakilan terdiri dari 39 orang Indonesia yang merupakan wakil-wakil raja, umat Kristen, dan beberapa kelompok etnik dari Kalimantan dan Indonesia Timur mendukung ide tentang negara federal. Pihak Belanda yang terkejut melihat reaksi orang-orang Indonesia yang menginginkan langkah-langkah yang sama dalam menuju arah otonomi murni kemudian mulai menyusun perencanaan untuk membentuk sebuah negara di Kalimantan dan di Indonesia Timur.<sup>1</sup>

Konferensi Malino menghasilkan beberapa keputusan diantaranya ialah mengenai pembentukan negara federasi untuk seluruh Indonesia yang terdiri dari 4 bagian yaitu Jawa, Sumatra, Borneo dan Timur Besar. Diputuskan pula mengenai ketatanegaraan yang disepakati untuk membangun kembali ketatanegaraan dari Hindia Belanda yang merupakan keseluruhan Indonesia yang meliputi federasi. Walaupun demikian, untuk negara-negara yang sebagian besar mempunyai kekuasaan pemerintahan sendiri akan disusun suatu desentralisasi dalam bentuk otonom serta beberapa putusan-putusan lainnya. Hasil-hasil pada Konferensi Malino kemudian dibawa pada sebuah konferensi lanjutan yang dinamai Konferensi Denpasar. Konferensi ini diadakan 5 bulan setelahnya yaitu pada 7 Desember 1946 yang

---

<sup>1</sup> Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005. hlm. 450.

bertempatkan di Bali. Konferensi Denpasar mengandung usulan-usulan dari para utusan-utusan yang berisi pertimbangan tentang bentuk dan kesatuan Indonesia. Pada Konferensi Denpasar inilah kemudian Negara Indonesia Timur terbentuk dengan ibukota Makassar.<sup>2</sup>

Sesuai kesepakatan pada Konferensi Malino yang memutuskan pengadaaan konferensi kedua sebagai konferensi lanjutan yang diadakan pada tanggal 7 Desember 1946 di Bali, Denpasar. Konferensi Denpasar dihadiri oleh 71 perwakilan dari seluruh daerah Indonesia Timur. Para utusan-utusan tersebut kebanyakan diwakili oleh Raja ataupun Sultan serta 15 utusan dari golongan minoritas seperti Cina dan Timur Asing lainnya. Konferensi ini bertujuan untuk membahas penyusunan ketatanegaraan baru di wilayah Timur Besar sesuai kesepakatan dalam Konferensi Malino melalui pembicaraan serta perundangan-perundangan dengan wakil-wakil pemerintah Belanda. Pada akhir Konferensi Denpasar tanggal 24 Desember 1946 terbentuklah negara baru bernama Negara Indonesia Timur sebagai negara federasi bersama Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), dan Kepulauan Maluku. Kemudian pada konferensi ini pula, Tjokorda Gde Raka Sukawati terpilih sebagai Kepala Negara NIT dengan Nadjamoeddin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri yang merangkap pula sebagai Menteri Perekonomian, dan Mr. Tadjoeeddin Noor sebagai Ketua Parlemennya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. Makassar : Kementerian Penerangan, 1953. hlm. 90-91.

<sup>3</sup> Rustam Hasyim., Mustafa Mansur., “Sultan Ternate Iskandar Jabir Syah : Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950”, *Jurnal Etnohistori*. Vol. 2 (1). 2015. hlm. 2-10.

Susunan kabinet pertama NIT ditetapkan sejak tanggal 10 Januari 1947. Kabinet ini diketuai oleh Nadjamoedin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Perekonomian. Dengan anggotanya yaitu Ide Anak Agung Gde Agung sebagai Menteri Dalam Negeri, Mr. Tjia Kok Tjiang sebagai Menteri Kehakiman, M. Hameljik sebagai Menteri Keuangan, E. Katoppo sebagai Menteri Pengajaran, G.R. Pantouw sebagai Menteri Kesehatan, Dr. S.J. Warouw sebagai Menteri Penerangan, E.D. Dengah sebagai Menteri Lalu Lintas dan Perairan, serta J. Tahija sebagai Menteri Sosial.<sup>4</sup>

Setelah melewati banyak permusyawaratan akhirnya dibentuklah Negara Indonesia Timur tersebut. NIT selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Timur pun tidak terkecuali, terkhusus struktur yang terdapat di Daerah Selebes Selatan sebagai salah satu daerah otonom sekaligus pusat administrasi NIT.

NIT merupakan salah satu Negara Bagian dari Negara Federal Hindia atau bisa disebut dengan *Gemeinebest* (Negara Persemakmuran) di bawah Pemerintahan Belanda.<sup>5</sup> NIT sendiri terbentuk pada tanggal 24 Desember 1946 yang beribukotakan di Makassar, sehingga Daerah Selebes Selatan menjadi pusat administrasi NIT.

---

<sup>4</sup> Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. Makassar : Kementerian Penerangan, 1953. hlm. 124.

<sup>5</sup> Bambang Sulistyono., "Beberapa Catatan Tentang Sejarah Negara Indonesia Timur", *Jurnal Lensa Budaya*. Vol. 12 (1). 2017. hlm. 85-90.

Daerah Selebes Selatan merupakan salah satu daerah otonom NIT yang menjadi pusat administrasi NIT. Walaupun telah dibentuk bersamaan dengan berdirinya NIT dalam kesepakatan Konferensi Denpasar, Daerah ini baru dapat diresmikan pada tahun 1948 bersamaan dengan dibentuknya Dewan Hadat Tinggi. Hadat Tinggi sendiri merupakan Badan Eksekutif tertinggi Daerah Selebes Selatan yang diketuai oleh Arumpone (Raja Bone).<sup>6</sup>

Daerah Selebes Selatan yang telah direncanakan pembentukannya sejak tahun 1946 bersamaan dengan pembentukan NIT membutuhkan waktu panjang untuk menyusun pemerintahannya. Keterlambatan yang terjadi menimbulkan kekosongan dalam struktur Pemerintahan Negara Indonesia Timur. Kekosongan ini baru dapat diisi melalui proses panjang selama 2 tahun setelah pembentukan NIT dan Daerah Selebes Selatan. Proses inilah yang kemudian perlu diketahui sebagai bagian dari proses pembentukan NIT.

Tiap daerah otonomi memiliki struktur Hadat Tingginya sendiri termasuk tugas dan fungsinya. Hadat Tinggi biasanya diisi dengan beberapa orang yang dipilih oleh Raja sebagai Kepala Daerah yang berwenang. Dalam beberapa daerah otonomi Hadat Tinggi ini juga biasa disebut dengan Opu. Mereka bertugas melaksanakan segala urusan pemerintahan sebagai satu Dewan dari Kerajaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> “De Daerah Zuid-Celebes”. *Het Dagblad : uitgave van de Nederlandsche dagbladpers te Batavia*. 15 November 1948.

<sup>7</sup> Muhammad Amir., “Dari Federal ke Unitaris : Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950”, *Jurnal Patanjala*. Vol. 2 (2). 2010. hlm. 64-67.

Hadat tinggi baru dilantik pada tahun 1948<sup>8</sup>, 2 tahun setelah NIT dibentuk. Pada hal inilah kemudian dianggap penting untuk diketahui mengenai proses pembentukan dari Hadat Tinggi. Perlu diketahui pula terkait apa-apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan peresmian Daerah Selebes Selatan selama 2 tahun.

Keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam NIT dalam hal ini ialah konflik internal, perpecahan pada badan pemerintahan, adat istiadat, bahkan luas wilayah Sulawesi Selatan. Konflik internal berupa aksi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bentuk protesnya. Perpecahan dalam badan pemerintahan yang dimaksud ialah terbaginya parlemen NIT menjadi dua bagian yaitu fraksi yang mendukung kerja sama dengan Belanda dan fraksi yang mendukung pembentukan Republik. Adat istiadat yang dimaksud ialah menyangkut budaya Sulawesi Selatan yang cenderung menghambat proses pemerintahan. Terakhir ialah luas wilayah Sulawesi Selatan yang cukup besar dan memiliki banyak daerah kerajaan membuat wilayah Sulawesi Selatan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses penggabungan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar NIT, dalam hal ini adalah dikeluarkannya proses unitaris yang terjadi di lingkup Republik Indonesia Serikat sampai akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan putusan untuk melebur seluruh negara bagian di

---

<sup>8</sup> Baca Pelantikan Hadat Tinggi Daerah Selebes Selatan, *Typ Ind. Ned. Druk. Makassar N.V*, Berisi Naskah pidato-pidato yang diucapkan pada tanggal 12 November 1948.

bawah komando RIS untuk melebur menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait Mengapa setelah pembentukan NIT, struktur pemerintahan di Selebes Selatan tidak segera dibentuk dan terkesan lambat?

Untuk menjawab permasalahan penelitian di atas, penulis mengajukan tiga pertanyaan penelitian yang akan diuraikan pada tiap bab, yaitu :

1. Bagaimana gambaran umum dan tatanan pemerintahan Negara Indonesia Timur?
2. Bagaimana proses pembentukan Daerah Selebes Selatan?
3. Bagaimana peran dan fungsi Dewan Hadat Tinggi dalam Pemerintahan daerah Selebes Selatan?

## **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini membahas mengenai Pemerintahan daerah Selebes Selatan pada masa Pemerintahan Negara Indonesia Timur. Penulis memberi batasan penelitian dengan dua batasan yaitu batasan temporal dan batasan spasial.

### **a. Batasan Temporal**

Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1946-1950. Masa ini merupakan masa dari berdirinya NIT sampai NIT runtuh, sehingga penulis menganggap perlu untuk menjadikan masa ini sebagai batasan temporal dalam penulisan.

### **b. Batasan Spasial**

Batasan spasial atau batasan wilayah pada penulisan ini adalah daerah Selebes Selatan, meliputi 39 wilayah kerajaan. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan bahwa Selebes Selatan merupakan pusat pemerintahan yang memegang peranan penting selama keberlangsungan NIT.

### **c. Batasan Tematik**

Penelitian ini membahas tema sejarah pemerintahan khususnya ketatanegaraan di wilayah Selebes Selatan, pada masa NIT tahun 1946-1950.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui gambaran umum dan tatanan pemerintahan Negara Indonesia Timur.
2. Mengetahui proses pembentukan daerah Selebes Selatan.
3. Mengetahui peran dan fungsi Dewan Hadat Tinggi.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat akademis :

1. Memberikan penjelasan mengenai gambaran umum serta tatanan pemerintahan Negara Indonesia Timur.
2. Memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan daerah Selebes Selatan.
3. Memberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi Dewan Hadat Tinggi.

Manfaat praktis :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah sumber dan kepustakaan tentang Negara Indonesia Timur.

## **1.6. Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1 Penelitian Yang Relevan**

Terdapat banyak penelitian yang relevan mengenai NIT secara umum telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya ialah sebuah buku yang diterbitkan Kementerian Penerangan pada tahun 1953 dengan judul Provinsi Sulawesi, pada buku ini membahas secara kronologis dalam babnya mengenai dinamika politik dan Pemerintahan NIT sejak 1946-1950. Buku ini memiliki pembahasan panjang mengenai bagaimana proses pembentukan NIT termasuk pula dinamika pergantian kabinet yang pernah pada masa Pemerintahan NIT. Pada beberapa bab di buku ini memiliki titik fokus pembahasan pada bagian politik dan keamanan sehingga pembahasan mengenai sistem pemerintahan di tiap-tiap daerah tidak begitu dijelaskan.<sup>9</sup>

Tulisan yang berjudul Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat yang ditulis oleh Ide Anak Agung Gde Agung, merupakan salah satu sumber yang membahas mengenai NIT. Buku ini secara lengkap membahas mengenai NIT secara garis besar dari pembentukan sampai pembubaran NIT secara ter kronologis dengan mengklasifikasinya menurut periode tiap-tiap kabinetnya.<sup>10</sup>

Tulisan dengan judul *The formation of federal Indonesia 1945 – 1949* merupakan buku yang ditulis oleh A. Arthur Schiller dan diterbitkan pada tahun 1955

---

<sup>9</sup> Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. Makassar : Kementerian Penerangan, 1953.

<sup>10</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985.



di Bandung. Buku ini ditulis dengan menggunakan Bahasa Inggris dan menjelaskan bagaimana bentuk pemerintahan lokal dengan pengelompokan periode sebelum, sesaat, dan setelah masa perang di Hindia Belanda. Penggambaran dewan-dewannya pun meski disebutkan, tetapi penjelasan yang terdapat dalam buku ini masih kurang mendalam.<sup>11</sup>

Tulisan yang berjudul *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an* yang ditulis oleh Dias Pradadimara, dkk. memiliki topik spasial yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan, namun jangkauan masalah dan periode yang termuat di buku dan penelitian yang akan dilakukan penulis tentu berbeda.<sup>12</sup>

Dari penelitian-penelitian yang telah ada, dengan mudah dapat mengetahui apa yang membedakan dengan penelitian ini yaitu titik fokus penelitiannya. Titik tekan penelitian ini adalah Selebes Selatan yang merupakan pusat administrasi pada masa Pemerintahan NIT. Selain itu juga penelitian ini membahas terkait proses pembentukan Dewan Hadat Tinggi yang merupakan Badan Eksekutif tertinggi Daerah Selebes Selatan yang dilantik sejak November 1948.

### **1.6.2 Landasan Konseptual**

Landasan konseptual utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah yang berfokus di Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan NIT.

---

<sup>11</sup> Schiller, A. Arthur. *The formation of federal Indonesia 1945 – 1949*. Bandung : Van Hoeve, 1955.

<sup>12</sup> Dias Pradadimara. *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah berupa pendekatan sejarah pemerintahan dan ketatanegaraan.

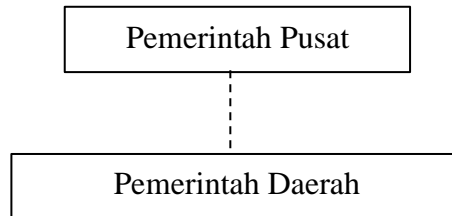
Ani Sri Rahayu dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas dan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah daerah dikepalai oleh seorang kepala daerah sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah otonom.

Walaupun pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dengan prinsip otonom yang seluas-luasnya, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang tidak bisa menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Urusan yang dimaksud adalah segala urusan pemerintahan pusat yang telah diatur dalam Undang-undang.

Pemerintah daerah dihadirkan dengan tujuan untuk mengurangi urusan pemerintahan yang terlalu berpusat di pemerintah pusat. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Walaupun pemerintah daerah memiliki hak-hak istimewa yang memperbolehkan pemerintah daerah mengadaptasi hak-hak tradisionalnya, susunan dan tata penyelenggaraan pemerintah daerah tetap diatur dalam Undang-undang.

Pembangunan negara dilaksanakan dengan menjalin kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin hubungan dan komunikasi selama menjalankan pemerintahan. Komunikasi dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena pembagian kewenangan yang ada.

Daerah otonom yang terdiri dari wilayah kesultanan dan kerajaan memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan tetap mempertahankan adat dan istiadatnya.



Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang dengan tetap memperhatikan keragaman daerah (budaya). Negara diharuskan mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Selain itu, negara juga diharuskan mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisional yang terdapat pada setiap daerah otonom.

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini telah melalui beberapa tahap seperti tahap heuristik atau pengumpulan sumber, tahap kritik sumber, tahap interpretasi, serta tahap historiografi.

#### **a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)**

Kegiatan paling utama dan pertama dilakukan dalam sebuah penelitian adalah pencarian sumber. Pencarian sumber merupakan upaya pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada tahap heuristik, sumber dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari para pelaku sejarah. Sumber primer ini dapat berupa wawancara narasumber, arsip, surat pribadi, bahkan harian para raja. Sumber primer inilah yang

dijadikan sebagai sumber utama, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh bukan dari para pelaku sejarah secara langsung. Sumber sekunder sendiri dapat berupa buku, jurnal ataupun tulisan ilmiah yang berdasarkan sumber pertama. Sedangkan berdasarkan bentuknya sumber sejarah juga dibagi menjadi sumber tertulis dan tak tertulis. Sumber tertulis dapat berupa dokumen-dokumen dan sumber tak tertulis dapat berupa artefak-artefak.

Pada tahap ini, peneliti melakukan studi literatur atau studi pustaka untuk mengumpulkan sumber dan data-data yang relevan dengan tema penelitian. Sumber dan data-data yang digunakan pun memiliki banyak jenis, seperti, buku, arsip, majalah dan koran, skripsi, disertasi, bahkan jurnal/tulisan ilmiah. Pencarian sumber ini dilakukan dengan mendatangi beberapa tempat seperti kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Selain itu penulis juga mendatangi beberapa perpustakaan terdekat untuk mendapatkan literatur tambahan. Perpustakaan yang telah didatangi ialah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Universitas Negeri Makassar (diakses secara online), Perpustakaan Universitas Islam Negeri Makassar (diakses secara online), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (diakses secara online), Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (diakses secara online), Perpustakaan Universitas Indonesia (diakses secara online).

Selain di perpustakaan, penulis juga melakukan kunjungan secara online pada situs web <https://www.delpher.nl/> yang merupakan situs web yang dikembangkan oleh

*Koninklijke Bibliotheek* atau Perpustakaan Nasional Belanda yang terletak di Den Haag yang dibuat pada tahun 2013. Situs ini mengoleksi surat kabar, majalah, buku, bahkan bulletin radio yang dapat diakses secara gratis.

Beberapa Arsip yang ditemukan ialah terdapat pada Inventaris Arsip *Regering van Oost Indonesie* (Pemerintah Indonesia Timur). Selain itu arsip-arsip yang didapatkan dari Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan antara lain :

- *Statblaad* atau Lembaran Resmi Negara dari tahun 1946-1950. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- *Inventaris Arsip Tana Toraja (1901-1959)*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 72. Rencana peraturan-peraturan pembentukan gabungan Selebes Selatan. 6 September 1947.
- *Inventaris Arsip Tana Toraja (1901-1959)*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 82. Berita sidang Dewan Selebes Selatan. 23 Mei 1949.
- *Inventaris Arsip Tana Toraja (1901-1959)*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 83. Sidang Hadat Tinggi Selebes Selatan. April 1949.
- *Inventaris Arsip Tana Toraja (1901-1959)*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 161. Peraturan pemerintah Kerajaan Bone, Luwu, Gowa,-

- *Inventaris Arsip Tana Toraja (1901-1959)*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 659. Berita sidang ketiga DPRD Sulawesi Selatan. 1 September 1950.
- *Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973)*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 73. Surat dari Hadat Tinggi Selebes Selatan mengenai masalah perkumpulan kepentingan daerah. 17 Maret 1949.
- *Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973)*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 177. Surat-surat masuk yang berhubungan dengan pengangkatan pejabat/pegawai pada Hadat Tinggi Selebes Selatan.
- *Inventaris Arsip Regering van Oost Indonesie (Pemerintah Indonesia Timur) 1946-1950*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 76. Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan. April 1949.
- *Inventaris Arsip Regering van Oost Indonesie (Pemerintah Indonesia Timur) 1946-1950*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Advise Hadat Tinggi Selebes Selatan. 1947-1949.

Di samping usaha-usaha di atas, penulis juga mendapatkan rekomendasi dan bantuan dari dosen-dosen Departemen Ilmu Sejarah terhadap sumber mengenai tema yang terkait.

#### **b. Kritik Sumber**

Kritik sumber dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengetahui relevansi dari sumber dan data-data yang ditemukan. Kritik sumber sendiri merupakan penerapan aturan atau prinsip untuk menguji kebenaran dan keaslian dari sumber-

sumber sejarah yang digunakan. Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi (internal) maupun bentuknya (eksternal). Penulis juga melakukan pengujian keabsahan sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dan juga melalui kredibilitas yang ditelusuri melalui kritik intern.

Kritik dilakukan dengan tujuan menyeleksi data sebelum dikelola. Data di sini adalah seluruh sumber yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik atau pencarian sumber.

#### **c. Interpretasi**

Pada tahap ini, setelah melakukan heuristik dan kritik sumber penulis kemudian melakukan penafsiran dengan menggunakan berbagai pendekatan. Penafsiran yang dimaksud ialah menarik kesimpulan inti dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan.

#### **d. Historiografi**

Tahap historiografi atau tahap penulisan merupakan tahap terakhir dalam penelitian. Historiografi dapat berarti penulisan, pelukisan, penggambaran sejarah tentang peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau.

Pada tahap ini, penulis menyusun kajian hasil temuan dalam suatu penulisan sejarah yang jelas dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tata penulisan EYD yang baik dan benar. Penulis juga tidak luput terhadap peranan pembimbing dalam membantu penyusunan penulisan penelitian ini.

Selama dalam tahap ini, penulis telah melakukan banyak pengkajian dan perbaikan yang disesuaikan dengan kritik dan saran dari para pembimbing.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

**Bab I**, pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

**Bab II**, bab ini berisi gambaran umum mengenai Negara Indonesia Timur seperti proses pembentukan, tatanan pemerintahan yang dimiliki, serta proses pembubaran NIT.

**Bab III**, pada bab ini dibahas mengenai bagaimana proses pembentukan Daerah Selebes Selatan serta Pemerintahan daerahnya.

**Bab IV**, bab ini akan membahas mengenai peran dan fungsi Dewan Hadat Tinggi.

**Bab V**, penutup, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan sekaligus jawaban dari pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM NEGARA INDONESIA TIMUR**

Pada bab II ini menjelaskan tentang gambaran umum Negara Indonesia Timur terutama mengenai pembentukan Negara Indonesia Timur pada tahun 1946 sampai dibubarkannya negara federal ini pada tahun 1950. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai gambaran umum Negara Indonesia Timur sejak pembentukannya pada tahun 1946 sampai pembubarannya pada tahun 1950.

#### **2.1 Pembentukan Negara Indonesia Timur**

Perang Pasifik Raya yang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 mendorong Pemerintah Belanda untuk memulihkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Setelah kekalahan Jepang, pasukan Australia telah berada di pangkalan Morotai Maluku Utara. Pada tanggal 13 Agustus 1945, pasukan ini diberikan tugas untuk memegang tanggung jawab sementara atas Kalimantan dan Indonesia Timur. Pasukan tentara Australia akhirnya mendarat di Makassar pada tanggal 21 September 1945 di bawah pimpinan Mayor J.G. Wegner. Pendaratan kedua terjadi pada tanggal 23 September 1945. Pada pendaratan kedua, mereka mendarat dengan membawa sekelompok tentara NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*).<sup>13</sup>

NICA merupakan sebuah pemerintahan buatan Belanda yang bertujuan mewujudkan kembalinya Belanda dalam memerintah di Indonesia. Hal tersebutnya

---

<sup>13</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. *Sejarah Perkembangan Pemerintah*. Sulawesi Selatan, 1991. hlm. 262-263.

yang menyebabkan tentara NICA bersekutu dan melebur di dalam pasukan tentara Australia yang akan ke Indonesia. Selain itu, NICA juga melakukan perjanjian *Civil Affairs Agreement* di London pada tanggal 24 Agustus 1945. Perjanjian itu berisi pengakuan hak NICA dalam mengambil alih tugas dan urusan sipil di Indonesia, hal ini tidak boleh diambil alih oleh pihak manapun sebagai alat politik Belanda dalam menjajah kembali Indonesia.<sup>14</sup>

Gabungan antara Australia dengan NICA kemudian mendapatkan protes dan kecaman dari masyarakat. Protes dilakukan dalam bentuk demonstrasi salah satunya ialah pada tanggal 27 September 1945, masyarakat melakukan pengibarisan merah putih di Makassar sebagai bentuk aksi protesnya. Perlawanan masyarakat makin tidak terbendung hingga akhirnya banyak pemuda di Sulawesi Selatan membentuk kelompok dan gerakan. NICA menilai kondisi ini telah menyulitkan dan menghambat strategi politik NICA di Sulawesi Selatan. Tentara Australia kemudian mengeluarkan sebuah maklumat militer yang berisi 10 aturan yang dapat menekan gerakan perlawanan tersebut. Maklumat itu ditandatangani oleh Brigjen Chilton sebagai Panglima Tentara Australia pada tanggal 29 Oktober 1945 di Makassar.<sup>15</sup>

Dr. Ratulangi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur berencana ingin melakukan perundingan untuk mengubah beberapa isi maklumat tersebut. Ratulangi

---

<sup>14</sup> Edward L. Poelinggomang., Suriadi Mappangara. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Sulawesi Selatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2005. hlm. 116.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 119-127.

merasa maklumat tersebut memberikan risiko yang besar terhadap para pelanggar. Dr. Ratulangi kemudian mengutus G. R. Pantouw untuk menyampaikan keinginannya kepada pihak sekutu. Pesan tersebut diterima namun Chilton kemudian meminta kepada Ratulangi untuk memberikan beberapa usulan terkait pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi. Tanggal 31 Oktober 1945, Dr. Ratulangi mengutus kembali G. R. Pantouw ke pihak sekutu untuk merundingkan usulnya seperti yang telah diminta. Terdapat dua usul yang diajukan Ratulangi, yaitu (1) Semua jabatan administrasi pemerintahan akan dipegang oleh warga lokal dari Tingkat atas sampai bawah, (2) daerah Sulawesi merupakan bagian dari Republik Indonesia. Usul tersebut mengalami perundingan yang panjang sampai akhirnya penetapannya ditunda untuk sementara. Setelah itu Ratulangi kemudian melakukan beberapa pertemuan dengan Raja-raja dan para dewan hadatnya. Pertemuan ini terjadi pada tanggal 6 dan 7 November 1945 di Watampone. Hasil pertemuan tersebut terus dilaporkan Ratulangi kepada Chilton melalui telegram.<sup>16</sup>

Tanggal 20 November 1945, Dr. Ratulangi dilaporkan atas tuduhan melakukan upaya untuk merubah hasil perundingannya dengan Chilton, namun upaya penangkapan tersebut menemui kegagalan. NICA kemudian berusaha memperoleh dukungan dari para raja dan tokoh masyarakat. Namun upaya tersebut juga gagal, banyak raja dan tokoh masyarakat yang menolak kehendak NICA. NICA lalu melakukan perundingan dengan pihak BPKR. Perundingan ini dilakukan sebanyak tiga

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 128-130.

kali yaitu pada tanggal 18, 20, dan 30 Desember 1945. Hasil pertemuan itu menyepakati penataan pemerintahan sementara di Sulawesi Selatan, yaitu dengan membentuk suatu Dewan Penasihat Sulawesi Selatan dan Badan Koordinasi yang berwenang untuk memerintah. Selain itu, melalui ketiga perundingan bersama dengan BPKR, NICA berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa peserta untuk melaksanakan pemerintahan sipil di Sulawesi.<sup>17</sup>

Setelah perundingan tersebut, BPKR mengalami perubahan pada tanggal 11 Februari 1946 menjadi Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi (PKRS). Setelah perubahan tersebut, banyak organisasi baru yang kemudian dibentuk seperti, Perkumpulan Buruh Indonesia (PBI), Partai Kemerdekaan Indonesia (PKI) yang kemudian singkatannya diubah menjadi PARKI, dan Partai Nasional Indonesia (PNI).<sup>18</sup>

NICA kemudian merencanakan sebuah konferensi yang nantinya dikenal dengan nama “Konferensi Malino”, hal ini mendorong NICA untuk membentuk suatu Dewan Sulawesi Selatan. Pembentukan badan ini bertujuan untuk merangkul tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat yang direncanakan akan dijadikan sebagai peserta Konferensi Malino. Badan ini dibentuk pada tanggal 25 Februari 1946 dan peraturan pelaksanaannya dikeluarkan oleh Komandan NICA pada tanggal 9 Maret 1946.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 131-133.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 134.

<sup>19</sup> *Ibid. Loc, Cit.*

Pada tanggal 5 April 1946, Dr. Ratulangi akhirnya ditangkap dan ditahan bersama dengan tokoh politik lainnya antara lain, Lanto Daeng Pasewang, Saleng Daeng Tompo, J. Latumahina, W. S. T. Pondaag, I. P. L. Tobing, dan Suwarno. Penangkapan ini menyebabkan adanya kekosongan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Tujuan utama dari penangkapan ini adalah untuk melancarkan rencana pengadaaan Konferensi Malino. Mereka selanjutnya diasingkan ke Serui, Irian Jaya pada tanggal 10 September 1946. Bersamaan dengan itu, aktivitas PKRS sepenuhnya dihentikan. Alasan NICA begitu berupaya untuk mewujudkan Konferensi Malino adalah disebabkan karena NICA menghendaki adanya pembentukan negara federal.<sup>20</sup>

#### **2.1.1. Konferensi Malino**

Pada tanggal 14 Juni 1946, berlangsung peralihan tanggung jawab pemerintahan dan keamanan. Pihak NICA (sekutu Belanda) menyerahkan tanggung jawab wilayah *Groot Oost* atau Timur Besar dan Kalimantan kepada H. J. van Mook. Tanggal 16 Juli 1946, Konferensi Malino dibuka secara resmi oleh van Mook di Malino, Gowa. Selain dari para peserta dari perwakilan daerah, konferensi ini juga dihadiri beberapa orang staf dan pejabat penting Belanda dan Pers.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.135.



**Gambar 1** : Pidato pembukaan oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H. J. Van Mook. Sumber : Kementerian Penerangan, *Propinsi Sulawesi*, (Makassar, Kementerian Penerangan, 1953).

Para perwakilan daerah terdiri dari 39 orang<sup>21</sup> yang merupakan perwakilan daerah masing-masing meliputi wakil-wakil raja, umat Kristen dan beberapa kelompok etnik dari Kalimantan dan Indonesia Timur. Dalam keberlangsungan Konferensi Malino, para wakil daerah tersebut mendukung ide negara federal sehingga disusunlah rencana-rencana untuk membentuk sebuah negara di Kalimantan dan Indonesia Timur.<sup>22</sup>

Beberapa yang menghadiri Konferensi Malino selain dari pejabat Belanda terdiri dari 11 anggota Pers dan beberapa perwakilan dari daerah. Adapun yang

---

<sup>21</sup> Jumlah peserta yang hadir di Konferensi sebanyak 39 peserta tidak termasuk dengan penasihat. (Sumber : Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005).

<sup>22</sup> Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005. hlm. 450.

mewakili daerah Sulawesi Selatan antara lain Andi Pabbenteng, La Ode Falihi, Sultan Buton, Nadjamoeddin Daeng Malewa dan Sonda Daeng Mattajang.<sup>23</sup>

Andi Pabbenteng merupakan seorang Raja dari Bone yang menjadi raja sejak 19 Juni 1946 sampai 2 Maret 1953.<sup>24</sup> La Ode Falihi adalah seorang sultan dari Buton yang memerintah dari tahun 1938 sampai tahun 1960.<sup>25</sup> Berbeda dengan dua orang tersebut yang merupakan seorang elit bangsawan di Sulawesi Selatan, Nadjamoeddin Daeng Malewa dan Sonda Daeng Mattajang bukanlah dari kalangan elit bangsawan, melainkan keduanya merupakan tokoh politik yang cukup berpengaruh saat itu. Mereka berempat kemudian ditetapkan sebagai perwakilan daerah Sulawesi Selatan pada Konferensi Malino.<sup>26</sup>

Konferensi ini dimulai dengan pidato van Mook yang menjelaskan terkait “ide federal”. Pidato itu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan-pandangan dari para peserta pada hari berikutnya. Secara keseluruhan, pandangan yang mendominasi ialah pernyataan sikap para peserta bahwa mereka setuju adanya kerja sama atau hubungan persahabatan dengan Pemerintah Belanda. Beberapa yang berpandangan demikian seperti perwakilan dari Sulawesi Utara, Sangihe-Talaud, Irian,

---

<sup>23</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985. hlm. 100-102.

<sup>24</sup> Risma Widiawati., “Peranan Bangsawan Bone Dalam Sistem Pemerintahan Dari Swapraja ke Kabupaten”, *Jurnal Arkeologi Papua*. Vol. 10 (2). 2018. hlm. 144-145.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977. hlm. 126.

<sup>26</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Loc. Cit.*

Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Ambon, serta Maluku Utara. Nadjamoeddin Daeng Malewa yang saat itu merupakan ketua delegasi Sulawesi Selatan memberikan kesimpulannya, bahwa kerja sama dengan Belanda diharapkan mampu mengembangkan dan membangun perekonomian Negara.<sup>27</sup>



**Gambar 2** : Suasana Konferensi Malino, H. J. Van Mook melakukan pidatonya. Sumber : Digital Collections of Leiden University Libraries. Creator : Netherlands Indies Government Information Service. KITLV. A1223.

Selain membahas mengenai hubungan antara Timur Besar dengan Belanda, Konferensi Malino juga membahas beberapa hal yang dibutuhkan dalam membentuk Negara Indonesia Timur salah satunya ialah tatanan negara. Tatanan negara Timur Besar belum dirampungkan pada Konferensi Malino, melihat para hadirin bersepakat akan diadakannya konferensi kedua yang nantinya disebut dengan nama Konferensi

---

<sup>27</sup> Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. Makassar : Kementerian Penerangan, 1953. hlm. 78-79.



Denpasar untuk melanjutkan semua putusan-putusan pada Konferensi Malino. Untuk sementara, dibentuk sebuah komisi yang berisikan 7 orang antara lain ; Tjokorde Gde Raka Soekawati, Nadjamoeddin Daeng Malewa, E. D. Dengah, Kapten Yahya, Ibrahim Sedar, Oeray Saleh, dan Dr. Liem Tjae Le. Komisi ini diberikan nama Collage 7 atau Komisi 7 yang bertugas mempersiapkan pembentukan Borneo dan Timur Besar. Selain itu Komisi 7 juga ikut dalam perancangan rencana peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur bersama dengan Komisariat Negara.<sup>28</sup>

Konferensi Malino menjadi langkah permulaan untuk membentuk suatu konsep tatanan negara bagi Indonesia bagian timur. Sehingga pembahasan pada konferensi ini masih bersifat umum dan dasar mengenai pembentukan negara federal.

### **2.1.2. Konferensi Denpasar**

Pada bulan Desember van Mook mengumpulkan kembali para perwakilan daerah dari Indonesia Timur dan kembali melakukan konferensi yang dinamakan Konferensi Denpasar. Konferensi ini direncanakan akan dimulai pada tanggal 7 Desember 1946 di Denpasar, Bali. Namun karena terdapat beberapa kendala, menyebabkan pembukaan Konferensi Denpasar mengalami penundaan dan baru resmi dibuka pada tanggal 18 Desember 1946.<sup>29</sup> Konferensi Denpasar merupakan sebuah konferensi lanjutan dari Konferensi Malino. Konferensi ini bertujuan menindaklanjuti

---

<sup>28</sup> Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. Makassar : Kementerian Penerangan, 1953. hlm. 81-82.

<sup>29</sup> Ajoeba Wartabone., “Demi Republik persatuan”, April 1947. hlm. 17-18.

dan merampungkan semua putusan-putusan yang hadir saat Konferensi Malino. Susunan acara Konferensi Denpasar ditetapkan sebagai berikut :<sup>30</sup>

Konferensi Denpasar dimulai dengan pembukaan yang diisi oleh pidato yang dibawakan oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H. J. Van Mook. Setelah pembukaan, wakil-wakil daerah dan para utusan mulai memberikan pandangan umumnya. Pandangan umum dari para wakil dan utusan kemudian dijawab oleh van Mook. Setelah dirasa semua pandangan umum telah terjawab, forum konferensi kemudian membahas mengenai rencana peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur. Setelah forum selesai, rangkaian penutupan konferensi dimulai. Pada penutupan, dilakukan pemilihan dan penetapan Kepala Negara dan kabinetnya, penetapan ordonansi, pembentukan Badan Perwakilan Sementara, serta penetapan Makassar sebagai ibu kota



**Gambar 3** : Suasana persidangan Konferensi Denpasar. Sumber : Koleksi Foto Elsevier. Nationaal Archief. 1946. hlm. 1.

---

<sup>30</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985. hlm. 145-146.

Negara Indonesia Timur. Konferensi baru resmi ditutup dengan pidato dari Kepala Negara dan terakhir pidato dari van Mook.

Konferensi ini dihadiri oleh 70 orang perwakilan 13 daerah antara daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sangir-Talaud, Maluku Selatan, Maluku Utara, Timor, Flores, Sumba, Sumbawa, Bali, Lombok, dan Minahasa. Selain itu, terdapat pula dari pihak Belanda yaitu : Letnan Gubernur Jenderal Dr. H. J. van Mook; Dr. E. O. Baron van Boetzelaer; Dr. W. Hoeven; C. J. H. de Waal; dan J. B. A. F. Mayor Polak.<sup>31</sup>

Alur pembahasan pada Konferensi Denpasar dilakukan sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa topik yang dirundingkan ialah mengenai tatanan negara, tentang undang-undang dasar, tentang pembagian daerah-daerah, tentang kepala negara, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Hasil persidangan ini rampung pada tanggal 24 Desember 1946 sekaligus berdirinya Negara Indonesia Timur secara resmi. Hasil keputusan lain ialah Makassar yang ditetapkan sebagai ibu kota NIT dan wilayah teritorial NIT mencakup bekas wilayah Timur Besar (*Groote Oost*). Tak lupa pula pemilihan Presiden NIT melalui

---

<sup>31</sup> Kementerian Penerangan. *Op. Cit.* hlm. 87-90.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 96-121.

metode pengumpulan suara, Raka Soekawati terpilih sebagai Presiden NIT dan Tadjuddin Noor sebagai ketua Parlemen NIT.<sup>33</sup>

## **2.2. Pemerintahan Negara Indonesia Timur**

Penyusunan tata pemerintahan Negara Indonesia Timur dilakukan pada Konferensi Denpasar berdasarkan Keputusan Konferensi Malino di mana Konferensi Denpasar mempunyai wewenang untuk menyusun tata pemerintahan dan ketatanegaraan baru di wilayah Timur Besar dengan melakukan perundingan-perundingan dan pembicaraan dengan Pemerintah Belanda. Konferensi juga Denpasar menghasilkan kepala negara dan ketua parlemen melalui pemilihan. Hasil dari pemilihan tersebut adalah terpilihnya Tjokorde Gde Raka Soekawati sebagai Kepala Negara NIT, Nadjamoeddin Daeng Malewa sebagai perdana menteri, dan Mr. Tadjuddin Noor sebagai Ketua Badan Perwakilan Sementara. Konferensi Denpasar juga menetapkan Makassar sebagai ibu kota NIT.<sup>34</sup> Hasil dari pembahasan yang dilakukan di Konferensi Denpasar mengenai penataan pemerintahan NIT kemudian dimuat dalam sebuah Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Anwar F. Mutawalli. “*Negara Indonesia Timur : Dari Negara federasi Hingga Integrasi Dalam Republik Indonesia (1946-1950)*”. Universitas Pendidikan Indonesia, OSF Preprints. hlm. 6.

<sup>34</sup> Edward L. Poelinggomang., Suriadi Mappangara. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Sulawesi Selatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2005. hlm. 144-145.

<sup>35</sup> Naskah Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur Tertanggal 23 Desember 1946.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa Konferensi Denpasar menciptakan struktur-struktur pemerintahan yang terdiri dari satu kepala negara, satu parlemen, satu badan perwakilan dan satu undang-undang dasar yang bersifat sementara yang telah disetujui semua peserta. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa administrasi pemerintahan NIT tetap berada dalam kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda.

Tatanan pemerintahan yang dibahas dalam konferensi menjadi acuan dalam susunan Pemerintahan Pusat di NIT. Presiden sebagai kepala negara yang menjadi puncak pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan NIT. Di bawah Presiden terdapat seorang Komisaris Mahkota yang juga dapat merangkap sebagai Wakil Presiden. Seperti yang dipahami bersama bahwa seorang ketua dan wakil merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian terdapat Perdana Menteri sebagai pimpinan pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan sesuai pada bidang-bidangnya dan diperbantukan oleh Menteri-menteri. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur Tahun 1946 pasal 15 ayat 1. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, seorang Kepala Negara dibantu oleh Menteri-menteri. Pengangkatan dan pemecatan para menteri pun menjadi tanggung jawab dan hanya boleh dilakukan oleh seorang Kepala Negara.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Naskah Undang-undang Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur Tahun 1946, Pasal 15.

Di bawah menteri-menteri ini terdapat Badan Perwakilan Sementara dan Senat yang merupakan badan yang isi oleh perwakilan daerah-daerah otonom NIT. Kedua badan ini membantu perkembangan pemerintahan terutama dalam menyuarakan kebutuhan daerah dan golongan masing-masing dalam Pemerintah Pusat. Badan Perwakilan Sementara dan Senat juga diatur dalam UU Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur Tahun 1946 pasal 4.<sup>37</sup>

Secara pengertian umum, Badan Perwakilan Sementara dan Senat akan terlihat seperti dua badan dengan pengertian yang sama. Namun sebenarnya terdapat perbedaan yang besar antara keduanya. Badan Perwakilan Sementara atau disingkat BPS banyak dipaparkan dalam UU Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur Tahun 1946. Salah satunya ialah dalam pasal 15 ayat 6, diterangkan bahwa Menteri-menteri bertanggung jawab langsung terhadap BPS baik secara struktur maupun secara tupoksi. Pada pasal 18 ayat 1 menerangkan, bahwa yang akan duduk dalam jabatan tersebut ialah orang-orang yang telah diutus dari daerah-daerah dan golongan tertentu baik dari etnis maupun agama, seperti golongan Tionghoa, Timur Asing, dan golongan agama Islam bahkan Kristen. Pada pasal 20 dan 21 menerangkan bahwa, BPS turut andil mengeluarkan dan menjalankan undang-undang Negara. Dalam hal ini pemerintah akan mengajukan rancangan UU kepada BPS untuk di tinjau dan BPS

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 4.

memiliki wewenang untuk melakukan perubahan terhadap rancangan UU yang diajukan pemerintah.<sup>38</sup>

Badan Perwakilan Sementara bertugas membantu Perdana Menteri NIT dan memiliki anggota sebanyak 70 orang. Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur pasal 18, ayat 3 menyatakan bahwa anggota BPS dapat ditambah maksimal 10 orang dengan memperhatikan anggota-anggota yang diangkat dan menjadi perwakilan dari kelompok tertentu. Selain itu, pada sidang pertama yang dilakukan di tahun 1947, anggota BPS terbagi dalam dua fraksi. Dua fraksi ini adalah fraksi progresif sebanyak 32 orang dan fraksi pembangunan sebanyak 37 orang.<sup>39</sup>

Pemilihan Ketua Badan Perwakilan Sementara dilakukan di Konferensi Malino tepat setelah pemilihan Kepala Negara NIT. Pada pemilihan tersebut, Tadjoeeddin Noor terpilih sebagai Ketua Badan Perwakilan Sementara Negara Indonesia Timur. Bersama dengan para peserta konferensi yang diangkat menjadi anggota BPS berjumlah 70 orang pun melakukan sumpah. Tadjoeeddin Noor kemudian mengambil alih posisi pimpinan rapat Konferensi Denpasar saat itu lalu melangsungkan rapat pertama badan tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 20 dan 21.

<sup>39</sup> Muhammad Amir., *et. Al. Sejarah Sulawesi Selatan : Integritas Kerajaan ke NKRI*. Makassar : Pustaka Refleksi, 2021. hlm. 113.

<sup>40</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 1985. hlm. 173-174.

Nama-nama anggota BPS tertulis dalam Staatsblad Negara Indonesia Timur No. 144 Tahun 1946. Berdasarkan Staatsblad tersebut, anggota BPS terbagi atas dua jenis kelompok, antara lain :

**Tabel 1** : Daftar Nama Anggota Badan Perwakilan Sementara

| Daftar Nama Anggota Badan Perwakilan Sementara |    |                             |
|--|----|-----------------------------|
| Perwakilan Daerah                              |    |                             |
| Sulawesi Selatan                               | 1  | Mr. Tadjuddin Noor (Ketua)  |
|  | 2  | H. A. van Goor              |
|  | 3  | La Sandara                  |
|  | 4  | Andi Iskandar               |
|  | 5  | Maddusila Daeng Paraga      |
|  | 6  | Andi Massarappi             |
|  | 7  | Andi Gappa                  |
|  | 8  | Abdullah Daeng Mappoji      |
|  | 9  | Boesat                      |
|  | 10 | Muhamad Akib                |
|  | 11 | Nadjamoedin Daeng Malewa    |
|  | 12 | Mr. S. Binol                |
|  | 13 | G. R. Pantouw               |
|  | 14 | Sonda Daeng Mattajang       |
|  | 15 | Andi Roha                   |
|  | 16 | R. Claproth                 |
|  | 17 | Mr. Teng Tjin Leng          |
| Minahasa                                       | 18 | E. D. Dengah                |
|  | 19 | E. Katoppo                  |
|  | 20 | H. J. Wenas                 |
| Sulawesi Timur                                 | 21 | Ajuba Wartabone             |
|  | 22 | Tom Olli                    |
| Sulawesi Tengah                                | 23 | Tjatjo Idjasa               |
|  | 24 | Daeng Maraja Lamakarate     |
|  | 25 | Wongko Lemba Talasa         |
|  | 26 | Ince Ahmad Dahlan           |
| Sangihe dan Talaud                             | 27 | J. E. Tatengkeng            |
|  | 28 | W. A. Sarapil               |
| Maluku Timur                                   | 29 | Iskandar Muhamad Jabir Syah |
|  | 30 | Zainal Abidin Alting        |
| Maluku Selatan                                 | 31 | J. Tahija                   |



|                                  |    |                                       |
|----------------------------------|----|---------------------------------------|
|                                  | 32 | D. P. Tahitu                          |
|                                  | 33 | E. U. Pupella                         |
| Bali                             | 34 | Mr. Anak Agung Ngoerah Ltoet Djlantik |
|                                  | 35 | I Gustu Bagus Oka                     |
|                                  | 36 | Tjokorde Gde Rake Soekawati           |
|                                  | 37 | Mr. I Gde Panetja                     |
|                                  | 38 | Ide Anak Agung Gde Agung              |
|                                  | 39 | Made Menra                            |
|                                  | 40 | Anak Agung Nyoman Panji Tisna         |
| Lombok                           | 41 | Raden Nona Nuraksa                    |
|                                  | 42 | I Gusti Bagus Oka                     |
|                                  | 43 | Laloe Manhep                          |
|                                  | 44 | Laloe Srinate                         |
|                                  | 45 | Laloe Abdoerahman                     |
| Timor                            | 46 | Gabriel Manek                         |
|                                  | 47 | I. H. Doko                            |
|                                  | 48 | A. Rotti                              |
| Flores                           | 49 | P. J. Raats                           |
|                                  | 50 | L. E. Mantiero                        |
|                                  | 51 | A. Conterius                          |
| Sumbawa                          | 52 | Muhammad Kaharuddin                   |
|                                  | 53 | Laloe Hasan Mustami                   |
|                                  | 54 | Abdulmutalib Daeng Taloe              |
| Sumba                            | 55 | T. Oemboe Toenggoe Billi              |
|                                  | 56 | Lede Kaloembang                       |
| Perwakilan Golongan dan Kelompok |    |                                       |
|                                  | 1  | Ahmad Syehan Bahmid                   |
|                                  | 2  | Th. van Emstede                       |
|                                  | 3  | H. A. van Goor                        |
|                                  | 4  | Han Boen Hiong                        |
|                                  | 5  | Syekh Hasan bin Alamudi               |
|                                  | 6  | Th. M. J. Janssens                    |
|                                  | 7  | Adrial Doema Andilolo                 |
|                                  | 8  | Haji Mukhtar Lutfi                    |
|                                  | 9  | A. C. Manopo                          |
|                                  | 10 | R. J. Matekohy                        |
|                                  | 11 | Oen Sik Hien                          |
|                                  | 12 | Dr. L. Onvlee                         |
|                                  | 13 | F. A. P Pitoi                         |
|                                  | 14 | Mr. Teh Sing Hoo                      |
|                                  | 15 | Mr. Tija Kok Tjiang                   |

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur Badan Perwakilan Sementara yang mengikut pada peserta Konferensi Malino tidak hanya terdiri dari perwakilan daerah melainkan perwakilan dari kelompok minoritas, yaitu yang mewakili daerah yang berjumlah 55 orang dan yang mewakili kelompok minoritas berjumlah 15 orang dengan satu orang ketua. Badan Perwakilan harus bertindak sebagai suatu anggota perwakilan rakyat yang mengumpulkan aspirasi-aspirasi rakyat yang diwakilinya.<sup>41</sup>

Berbeda dengan senat, walaupun secara garis besar BPS dan Senat sama-sama merupakan badan yang mewakili golongan tertentu, namun Senat tidak dibentuk seeluasa BPS. Pembentukan Senat dalam Parlemen Pemerintahan NIT menunjukkan bahwa NIT menggunakan sistem dua kamar atau bikameral atau *tweekamer stelsel*.<sup>42</sup> Pembentukan Senat menjadi tanggung jawab BPS. Proses pembentukan itu dimulai sejak tanggal 4 Mei 1948 dalam sebuah sidang perdana BPS. Dalam sidang tersebut, BPS meminta untuk dibuatkan sebuah rencana perundang-undangan salah satunya ialah Rencana UU Pembentukan Senat Sementara. Rencana UU Pembentukan Senat tersebut baru diajukan oleh Pemerintah dan diterima oleh BPS pada tanggal 23 Desember 1948. Rencana UU Pembentukan Senat Sementara tersebut menyebutkan bahwa Senat akan terdiri dari 13 anggota yang mewakili 13 daerah.

---

<sup>41</sup> Staatsblad Oost Indonesie. Tahun 1946. No. 144.

<sup>42</sup> Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, (Sulawesi : Kementerian Penerangan RI, 1953), hlm. 100-101.

Adapun nama-nama anggota Senat tersebut sebagai berikut<sup>43</sup>

1. Ahmad Marzuki Daeng Marala
2. W. A. Sarapil
3. H. C. J. Manoppo
4. Daeng Maraja
5. Dodo Muchsin bin Usman Syah
6. A. B. Latuconsina
7. J. U. M. Amalo
8. Umbu Tunggu Billi
9. Sultan Kaharuddin
10. Lalu Abdurrahman
11. Gusti Ngurah Kanta

Dari daftar tersebut terlihat bahwa anggota Senat hanya berjumlah 11 orang. Sedangkan menurut Rencana UU Pembentukan Senat Sementara telah ditetapkan bahwa jumlah anggota senat haruslah 13 orang dengan mewakili 13 daerah. Artinya, terdapat ketidaksesuaian dalam proses pembentukan Senat sehingga menyebabkan anggota Senat yang terpilih tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Daftar nama tersebut pun baru dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1950.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Naskah Arsip Saleh Lahade*. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. No. Reg. 210.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Rencana UU Pembentukan Senat Sementara juga memuat tugas utama dari Senat. Tugas utama tersebut adalah mempertimbangkan usulan konstitusi baru. Anggota Senat tidak hanya dianggap sebagai wakil daerah, namun juga berperan sebagai juru bicara para penguasa di daerah yang memiliki pemerintahan sendiri. Di bawah konstitusi baru, senat hanya mempunyai peran kecil dalam legislatif, yaitu kekuasaan untuk menunda pengesahan suatu rancangan undang-undang.<sup>45</sup> Meskipun tugas Senat telah diberikan dalam Rencana UU Pembentukan Senat Sementara, namun wewenang Senat pada dasarnya telah dibatasi melalui kesepakatan dalam forum Konferensi Denpasar atas dasar usul van Mook. Setelah mengalami pembatasan, garis besar wewenang Senat hanya terletak dalam bidang perundang-undangan dan sebagai pemberi nasihat kepada Pemerintah. Senat tidak memiliki hak untuk menolak ataupun mengubah suatu rencana Undang-undang atau Peraturan Presiden, namun Senat berwenang atau diperbolehkan untuk menahan rencana Undang-undang atau peraturan tersebut dan mengembalikannya kepada Pemerintah. Artinya, walaupun sebuah rencana Undang-undang atau peraturan telah mendapatkan persetujuan dari BPS, rencana Undang-undang atau peraturan tersebut tidak dapat disahkan sebelum mendapatkan persetujuan dari Senat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> A. Arthur, Schiller. *The Formation of Federal Indonesia 1945-1949*. Van Hoeve : The Hague, 1955. hlm. 153.

<sup>46</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985. hlm. 457-458.

Perangkat terakhir pada struktur di atas adalah Komisariat Negara Tengah. Komisariat Negara Tengah merupakan jembatan atau perpanjangan tangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Komisariat Negara Tengah ini selain bertanggung jawab terhadap Daerah Selebes Selatan, ia juga bertanggung jawab terhadap Daerah Maluku Selatan. Komisariat Negara akan diangkat langsung oleh Presiden NIT. Seorang Komisariat Negara bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Pengangkatan jabatan Komisariat Negara ini menjadi tanda dihapuskannya jabatan Residen dan Lembaga Keresidenan. Komisariat Negara baru dinyatakan resmi ketika dikeluarkannya Undang-undang tentang pembentukan 3 Komisariat Pemerintahan Indonesia Timur S.IT.1950./5 pada tanggal 19 Desember 1949.<sup>47</sup>

Ketiga Komisariat itu meliputi, (1) Komisariat Negara Selatan yang melingkupi Daerah-daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor; (2) Komisariat Negara Tengah melingkupi Daerah Selebes Selatan dan Daerah Maluku Selatan; dan (3) Komisariat Negara Utara melingkupi Daerah-daerah Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sangihe dan Talaud, serta Maluku Utara. Tiap-tiap Komisariat Negara akan dikepalai seorang Komisararis Negara yang dibantu oleh seorang Utusan Komisararis. Seorang Komisararis Negara bertugas menjalankan tugas yang bersifat mengawasi menurut Undang-undang. Misalnya mengenai pengawasan terhadap

---

<sup>47</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan*. Sulawesi Selatan, 1991. hlm. 278-279.

kekuasaan dan keberjalanan Pemerintahan daerah, serta koordinasi di antara daerah maupun dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.<sup>48</sup>

Itulah keseluruhan penjelasan mengenai struktur Pemerintahan NIT berdasarkan hasil dari perundingan dalam Konferensi Denpasar, di mana hasil-hasil perundingan terkait pembentukan NIT dan tatanan pemerintahannya dituangkan dalam perundangan-undangan.

Hasil dari Konferensi Denpasar kemudian ditindaklanjuti demi apa yang dicita-citakan dalam konferensi tersebut yaitu, penataan kembali pemerintahan Negara Indonesia Timur. Setelah Konferensi Denpasar selesai, hal pertama yang dilakukan ialah pembentukan kabinet oleh Nadjamoeddin Daeng Malewa pada tanggal 10 Januari 1947. Nadjamoeddin Daeng Malewa baru mengemukakan program kerja kabinetnya pada tanggal 22 April 1947 di dalam sebuah sidang Badan Perwakilan Sementara yang dipimpin oleh Tajuddin Noor.<sup>49</sup>

Rencana peraturan pembentukan NIT disusun oleh Komisariat Pemerintahan Umum setelah mendengar nasehat-nasehat dari “komisi 7” yang ditunjuk pada saat Konferensi Malino. Rencana peraturan tersebut terbagi atas 3 bab :<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung, 1967. hlm. 147.

<sup>49</sup> Harun Kadir. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sulawesi Selatan*. Makassar : BAPPEDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 326-328.

<sup>50</sup> Komisi 7 merupakan suatu badan/panitia yang dibentuk saat Konferensi Malino yang memiliki tugas untuk melakukan perundingan bersama dengan wakil-wakil Pemerintah Hindia Belanda, yaitu Komisariat Pemerintahan Umum mengenai hal-hal yang menyangkut pembaharuan susunan ketatanegaraan di Timur Besar,

Bab pertama dalam Rencana Pembentukan NIT ini menyebutkan bahwa NIT akan dibentuk dengan mencakup wilayah Provinsi Timur Besar dulu sesuai dengan bunyi ordonansi tanggal 19 Februari 1936 dan keputusan Pemerintah tanggal 25 Mei 1938, terkecuali Keresidenan Nieuw Guinea (Irian Jaya). Selain itu bab ini juga menentukan kekuasaan pemerintahan akan tetap menjadi wewenang pemerintah pusat atau Pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Wewenang ini meliputi hal-hal urusan luar negeri, pertahanan, mahkamah agung, imigrasi dan emigrasi, nasionalis, moneter, perguruan tinggi dan lain-lainnya, sehingga wewenang yang dikecualikan untuk dilimpahkan menjadi berjumlah 40 macam. Pembentukan Komisaris Mahkota juga diatur dalam bab ini. Wewenang dan kekuasaan Komisaris Mahkota antara lain memberikan bantuan kepada NIT dalam menyelesaikan pemerintahan dalam arti yang umum, mengawasi penduduk mendapatkan keadilan terutama terkait hal-hal mengenai hak-hak asasi dalam beragama dan keamanan umum, mengawasi terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di NIT yang dapat mewakili golongan kecil, serta mengawasi kedudukan raja sebagai kepala swapraja.<sup>51</sup>

---

Kalimantan, Bangka, Riau dan Belitung. Anggota-anggota Komisi 7 antara lain : Tjokorde Gde Raka Soekawati (Bali), Nadjamoedin Daeng Malewa (Sulawesi Selatan), E. D. Dengah (Minahasa), Kapten Tahja (Maluku Selatan) Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan), Oeray Saleh (Kalimantan Barat), dan Dr. Liem Tjae Le (Bangka). (Sumber : Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985. hlm.115).

<sup>51</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 1985. hlm. 140-141.

Bab 2 pada Peraturan Pembentukan NIT memuat ketentuan-ketentuan tentang pelimpahan kekuasaan dan wewenang serta masalah keuangan negara.<sup>52</sup> Secara garis besar, Negara Indonesia Timur tersusun atas 2 sampai 3 tingkatan daerah otonom yaitu (1) daerah; (2) daerah bahagian; dan (3) daerah anak bahagian.<sup>53</sup>

Pada bab 3 menyebutkan pembagian-pembagian NIT menjadi 13 Daerah Otonom, yaitu : Daerah Selebes Selatan, Daerah Minahasa, Daerah Sangihe dan Talaud, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Sulawesi Tengah, Daerah Bali, Daerah Lombok, Daerah Sumbawa, Daerah Flores, Daerah Sumba, dan Daerah Timor dengan kepulauan sekitarnya, Daerah Maluku Selatan, dan Daerah Maluku Utara. Selain itu, dalam bab ini juga tertera hal-hal yang bersangkutan dengan lembaga negara yang terdiri dari suatu pemerintahan yang dikepalai seorang Kepala Negara, yang mengangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Selama pengangkatan Menteri, kepala negara harus memperhatikan ketentuan bahwa kabinet harus bisa bekerja sama dengan Badan Perwakilan Rakyat. Di bab 3 juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai Badan Perwakilan Rakyat serta wewenangnya. Bab ini memutuskan bahwa wakil-wakil yang hadir dalam Konferensi Denpasar diangkat sebagai anggota Badan Perwakilan Sementara. Badan Perwakilan Sementara diberikan hak legislatif yang dilakukan bersama pemerintah dan hak

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>53</sup> The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung, 1967. hlm. 236.



merubah rencana undang-undang yang diajukan kepada Badan Perwakilan Rakyat (*amandemen*).<sup>54</sup>

Sebagian besar utusan tidak menyetujui rancangan peraturan pembentukan tersebut. Mereka merasakan terdapat unsur-unsur campur tangan yang ingin dilakukan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pemerintahan dan rumah tangga NIT. Akhirnya diajukanlah usul-usul perubahan yang disampaikan Nadjamoedin Daeng Malewa dan didukung oleh 19 utusan lainnya pada tanggal 18 Desember 1946. Usul perubahan itu antara lain adalah agar nama Timur Besar (yang termuat di dalam pasal 1) diganti dengan 'Negara Indonesia Timur'. Diusulkan pula untuk mengganti pasal 2 dengan suatu pasal baru yang lebih menonjolkan persamaan hak dan derajat Negara Indonesia timur dengan negara bagian lainnya. Usulan lainnya ialah penghapusan pasal 3 pada peraturan pembentukan NIT.<sup>55</sup>

Adapun pembagian Daerah Otonom beserta daerah swaprajanya adalah sebagai berikut :

1. Daerah Selebes Selatan. Terdiri dari Keresidenan Sulawesi Selatan dan daerah taklukannya termasuk Kerajaan Gowa, Bone Wajo, Soppeng, Malusetasi, Suppa, Sawito, Batulappa, Kassa, Sidenreng, Rappang, Maiwa, Enrekang, Malua, Buntu Batu, Alla, Barru, Soppeng ri Aja, Tanete, Majene, Pambuang,

---

<sup>54</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Op.Cit. Loc. Cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 157-159

Cenrana, Balangnipa, Binuang, Mamuju, Tapalang, Luwu, Tana Toraja, Buton dan Laiwui.

2. Daerah Minahasa.
3. Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud. Daerah ini terdiri dari Kerajaan Tabukan, Siao, Kendehe-tahuna, Manganitu, Tagulandang dan Kepulauan Talaud yang semuanya terikat satu sama lain secara perserikatan.
4. Daerah Sulawesi Utara. Daerah ini terdiri dari *Afdeeling* Gorontalo dan *Onderafdeeling* Bolaang Mongondow, termasuk juga Kerajaan Buol, Bolaang Mongondow, Bolaang Oeki, Bintaena dan Kaidipang Besar.
5. Daerah Sulawesi Tengah. Daerah ini terdiri dari *Afdeeling* Poso dan Donggala, serta melingkupi Kerajaan Tojo, Poso, Lore, Una-Una, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawa Eli, Palu, Sigi Dolo, Kulawi, Parigi, Mowutong, dan Toli-Toli yang semuanya terikat satu sama lain secara perserikatan.
6. Daerah Bali. Daerah ini terdiri dari Kerajaan Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianjar, Klungkong, Bangli dan Karangasem. Semua Daerah Kerajaan ini terikat secara perserikatan.
7. Daerah Lombok. Daerah ini hanya terdiri dari *Afdeeling* Lombok.
8. Daerah Sumbawa. Daerah ini terdiri dari Kerajaan Bima, Dampo dan Sumbawa yang terikat di dalam perserikatan.
9. Daerah Flores. Daerah ini terdiri dari Kerajaan Endre, Lio, Larantuka, Adonara, Sikka dan daerah taklukannya seperti Ngada, Rioeng, Nageh-Ko, dan Manggarai yang semuanya berada dalam satu perserikatan.

10. Daerah Sumba. Daerah ini terdiri dari Kerajaan Kenatang, Lewa, Tabundung, Melolo, Rendi, Waijolo, Masukarera, Lavera, Waisyewa, Kodi, Laoli, Memboro, Ombo Ratu Nggay, Anakala, Wanokaka dan Lamboja yang semuanya terikat dalam satu perserikatan.
11. Daerah Timur dan Kepulauannya. Daerah ini terdiri dari Kerajaan Kupang, Amarasi, Fatolo, Affoan, Roti, Savoe, Mollo, Amanoeban, Amanatun, Miomaffie, Beboki, Insana, Beloe, Alor, Barnusa, Pantar Matahari Naik, Koei, Kelana, Batulolong dan Puremau yang terikat dalam satu perserikatan.
12. Daerah Maluku Selatan. Daerah ini terdiri dari lingkungan Maluku Selatan yang berdiri sendiri.
13. Daerah Maluku Utara. Daerah ini terdiri dari Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan yang semuanya terikat dalam satu perserikatan.<sup>56</sup>

NIT memiliki struktur pemerintahan yang terdiri atas Presiden sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai pimpinan pemerintahan yang memimpin para menteri, residen, asisten residen sebagai pimpinan *afdeeling*, raja-raja sebagai pimpinan *swapraja*, ketua Hadat sebagai pimpinan *neo-swapraja* (semacam *onderafdeeling*) atau distrik, dan yang paling bawah adalah kampung atau gabungan

---

<sup>56</sup> Naskah Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur Tertanggal 23 Desember 1946. Bab III. Pasal 14 ayat 1.

kampung. Makassar dipimpin oleh seorang Walikota (*burgemeester*) yang setingkat dengan asisten residen.<sup>57</sup>

Kepala Negara memiliki gelar sebagai Presiden yang dipilih oleh Badan Perwakilan Sementara (BPS) pada Konferensi Denpasar. Pemilihan Kepala Negara dilakukan di Konferensi Denpasar dengan mengikuti peraturan pemilihan Kepala Negara yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

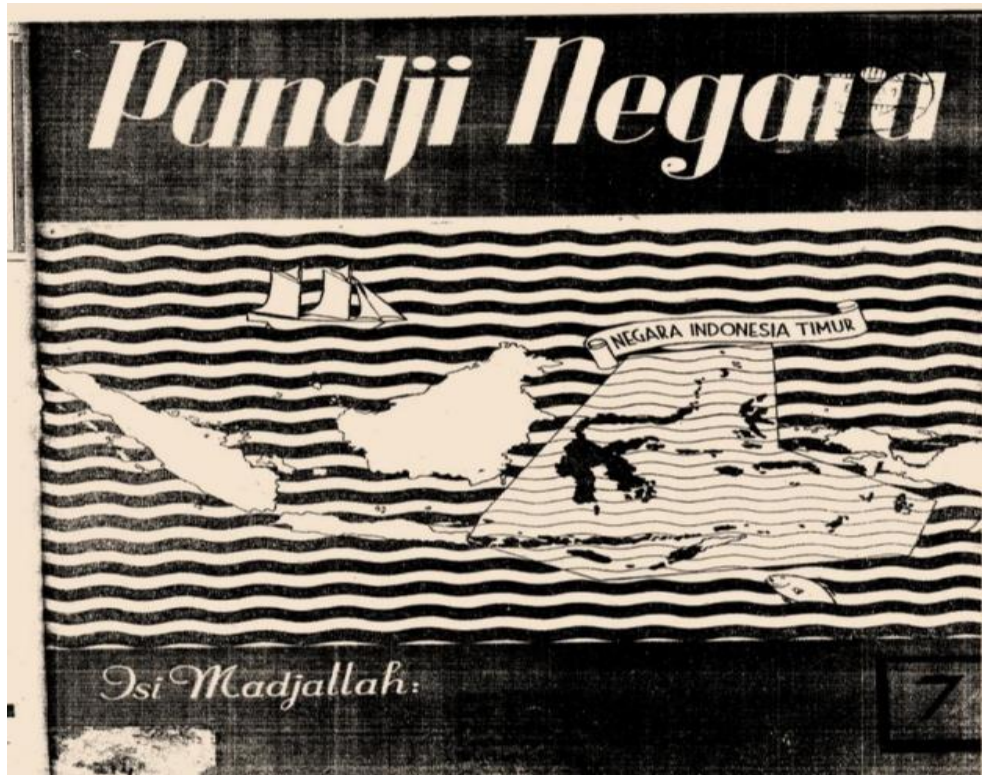
Pada pemilihan pertama, jumlah suara yang masuk adalah sebanyak 68 suara. Tjokorde Gde Raka Soekawati mendapatkan 31 suara, Tadjoeeddin Noor mendapatkan 24 suara dan Nadjamoeddin Daeng Malewa mendapatkan 13 suara. Lalu pada pemilihan kedua, terdapat 46 suara. Tjokorde Gde Raka Soekawati mendapatkan 31 suara, Tadjoeeddin Noor mendapatkan 3 suara, dan Nadjamoedin Daeng Malewa mendapatkan 6 suara. Hingga pada pemilihan ketiga terdapat 36 suara untuk Tjokorde Gde Raka Soekawati dan sebanyak 32 suara untuk Tadjoeeddin Noor. Maka berdasarkan hasil ini, Tjokorde Gde Raka Soekawati terpilih menjadi Kepala Negara Indonesia Timur.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Amir., *et. Al. Sejarah Sulawesi Selatan : Integritas Kerajaan ke NKRI*. Makassar : Pustaka Refleksi, 2021. hlm. 113.

<sup>58</sup> Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985. hlm. 168.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 170.



**Gambar 4 :** Peta wilayah Negara Indonesia Timur dari majalah Pandji Negara. Sumber : I. D. Makkelo, “Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan : Makassar Sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946 – 1950”, (*Gadjah Mada Journal of Humanities*, 2017), Vol. 2. No. 1.

## 2.2 Bubarnya Negara Indonesia Timur

Ide Anak Agung Gde Agung memprakarsai sebuah pertemuan antara Pemerintah Republik Indonesia yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom dengan Pemerintah Belanda. Pertemuan ini kemudian menghasilkan sebuah lembaga yang diberikan nama BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*) atau Permusyawaratan Negara-negara Federal. BFO memiliki peran sebagai pengagas negara federal di Indonesia. BFO lalu membuka perundingan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 1949 seperti Konferensi Antar Indonesia. Konferensi ini pun menghadirkan wakil-wakil dari Republik Indonesia, negara-negara bagian dan daerah otonom yang ada di Indonesia untuk melakukan persiapan Konferensi Meja Bundar.<sup>60</sup>

Pada bulan Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar pun akhirnya diadakan di Den Haag. Setelah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Belanda, pada tanggal 29 Desember 1949 Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) secara resmi. Selain itu, pihak Belanda juga mengembalikan sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Papua. Pada saat yang sama, Soekarno diangkat menjadi Presiden RIS dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus

---

<sup>60</sup> Harvey, Barbara S., *Pemberontakan Kahar Muzakkar : Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989. hlm. 153.

Wakil Presiden RIS. Negara-negara bagian dan daerah otonom buatan Pemerintah Belanda pun bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>61</sup>

Pada tanggal 16 Maret 1950, jalanan Kota Makassar dipenuhi oleh 200.000 rakyat yang melakukan demonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan serta menuntut pemerintahan pusat RIS untuk membubarkan NIT dalam waktu secepat-cepatnya. Demonstrasi yang terjadi di Kota Makassar menyebabkan APRIS turun tangan untuk mengamankan kota tersebut. Kedatangan APRIS tidak selalu diterima dengan baik oleh para petinggi NIT, beberapa di antaranya ialah Chris Soumokil dan Andi Aziz. Soumokil dan Andi Aziz lalu bekerja sama untuk menghentikan kedatangan pasukan APRIS ke Kota Makassar.<sup>62</sup>

Chris Soumokil merupakan seorang jaksa agung di NIT yang beberapa kali memegang jabatan sebagai Menteri Kehakiman di NIT. Kedua tokoh ini sangat membenci kedatangan APRIS sehingga mendorong keduanya untuk melakukan serangkaian kerja sama untuk mempertahankan keutuhan NIT.<sup>63</sup>

Andi Aziz lalu melancarkan pemberontakannya dengan membawa 1.300 mantan anggota KNIL bersamanya, mereka menduduki Kota Makassar pada tanggal 5

---

<sup>61</sup> Muhammad Amir., “Dari Federal ke Unitaris : Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950”. *Jurnal Patanjala*. Vol. 2 (2). 2010. hlm. 351.

<sup>62</sup> Anwar F. Mutawalli. “*Negara Indonesia Timur : Dari Negara federasi Hingga Integrasi Dalam Republik Indonesia (1946-1950)*”. Universitas Pendidikan Indonesia, OSF Preprints. hlm. 12.

<sup>63</sup> Harvey, Barbara S., *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989. hlm. 163-164.

April 1950. Perlawanan Andi Aziz baru berakhir setelah ia menyerahkan dirinya ke Jakarta dan dipenjara pada tanggal 13 April 1950. Pada tanggal 21 April 1950, Presiden Soekawati menyampaikan sebuah pesan agar NIT dibubarkan dan bergabung kembali ke dalam RI. Pernyataan ini mendapatkan dukungan dari seluruh daerah NIT kecuali Maluku Selatan. Chris Soumokil yang sempat melarikan diri saat Andi Aziz menyerahkan diri kemudian melancarkan pemberontakannya bersama mantan KNIL di Maluku Selatan dengan mendirikan Republik Maluku Selatan pada akhir April 1950. Presiden Soekawati kemudian melakukan pertemuan dengan Moh. Hatta dan Dr. Mansur yang merupakan presiden Negara Sumatera Timur pada tanggal 3-5 Mei 1950. Pertemuan dilakukan untuk membahas perencanaan proses integrasi NIT dan Negara Sumatera Timur ke dalam RI. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Soekarno membubarkan RIS dan mengembalikan Pemerintahan menjadi Republik Indonesia. Negara-negara bagian dan daerah otonom seperti NIT akhirnya dibubarkan pada hari yang sama dan bekas wilayahnya terintegrasi kembali ke dalam Republik Indonesia.<sup>64</sup>

Pembubaran ini dimuat dalam pidato yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam upacara peringatan ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1950. Pidato tersebut diumumkan ke seluruh penjuru Indonesia sekaligus sebagai pertanda berakhirnya semua negara bagian di Indonesia. Bukti lain dari pembubaran tersebut ialah pengumuman Undang-undang Dasar Sementara Tahun

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 11



1950 yang telah disahkan sejak tanggal 15 Agustus 1950. Dengan adanya Undang-undang tersebut, terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>65</sup>

Adapun Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan mengumumkan proklamasi yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan melepas diri dari NIT dan menyatakan masuk ke dalam bagian Republik Indonesia sebagai satu provinsi. Proklamasi ini dilakukan pada tanggal 26 April 1950 dan ditandatangani oleh Andi Idjo Karaeng Lalolang sebagai perwakilan Pemerintah Selebes Selatan dan Andi Burhanuddin sebagai perwakilan dari Dewan Selebes Selatan.



**Gambar 5 :** Ide Anak Agung Gde Agung.  
Sumber : sampul buku Ide Anak Agung Gde Agung, *dari negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*, 1985.

---

<sup>65</sup> Leirissa, R.Z. *Kekuatan Ketiga : Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sejarah, 2006. hlm. 249.

Ide Anak Agung Gde Agung merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan Negara Indonesia Timur sampai dibubarkannya NIT tahun 1950. Peranan Ide Anak Agung ini telah terlihat bahkan sejak diselenggarakannya Konferensi Malino. Terutama peranannya semakin menonjol ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri ketiga pada tahun 1947 menggantikan Nadjamoeddin Daeng Malewa. Program-program yang dihadirkan oleh Ide Anak Agung dalam kabinetnya menekankan untuk mewujudkan sistem federal dengan cara yang demokratis. Ide Anak Agung dengan strategi politik *synthesanya* berhasil menjadikan kabinetnya mendapatkan banyak dukungan dari kedua fraksi parlemen. Politik *synthesa* yang dijalankan Ide Anak Agung bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan, selain itu, politik *synthesa* ini diharapkan mampu meredam konflik antara pihak Republik Indonesia dan Pemerintah Hindia Belanda dengan tetap menggunakan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.



**Gambar 6** : Ide Anak Agung Gde Agung bersama anggota kabinetnya yang kedua. Sumber : Kementerian Penerangan, *Propinsi Sulawesi*, (Makassar, Kementerian Penerangan, 1953).

Pada bulan Februari 1948, Ide Anak Agung mampu membangun hubungan yang baik antara NIT dengan Republik Indonesia yang menyebabkan diakuinya NIT sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS). Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk tim persaudaraan dalam misi parlemen yang terdiri dari A. Mononutu; Dr. H. Bergema; Pastor A. Conterius; Andi Gappa; Andi Massarappi; Anak Agung Nyoman Panji Tisna; A. Wartabone; dan Tjan Tjoen Tek.<sup>66</sup>

Ketika *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* atau disingkat dengan nama BFO dibentuk melalui konferensi yang diadakan di Bandung. Konferensi ini dinamakan *Staatkundige Eenheden Conferentie* atau Konferensi Satuan-satuan Kenegaraan. Konferensi ini diadakan di Bandung pada tanggal 15-18 Juli 1948. Ide Anak Agung pun menjadi bintang utama dalam konferensi tersebut, Ide Anak Agung bahkan menjadi tokoh yang bertanggung jawab untuk menentukan jadwal sampai penyusunan acaranya. Selama berjalannya konferensi, Ide Anak Agung memimpin diskusi dengan konsep Politik Synthesa Nasionalnya. Apalagi Ide Anak Agung juga ditunjuk untuk menjadi anggota BFO pada bulan Agustus 1948.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Leirissa, R.Z. *Kekuatan Ketiga : Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sejarah, 2006. hlm. 91-101.

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 128-141.